

KATA PENGANTAR

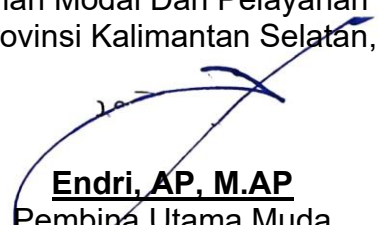
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Penyusunan LAKIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

LAKIP tahun 2026 ini disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026-2030. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,



Endri, AP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19750821 199412 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaa, kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

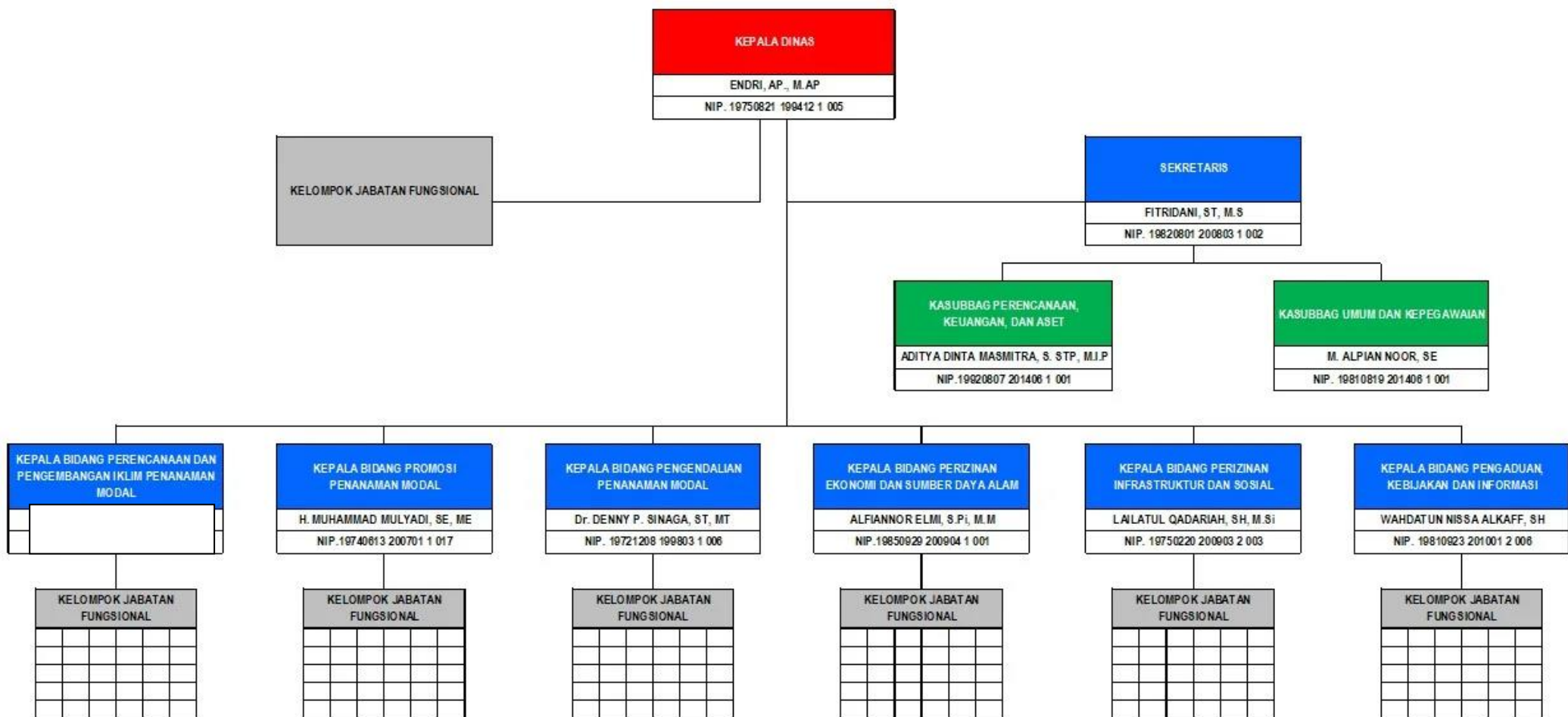
Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
7. Pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

C. Struktur Organisasi

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**, terdiri dari atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- 4. Bidang Promosi Penanaman Modal**
- 5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal**
- 6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
- 7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial:**
- 8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi**
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional**



D. Isu Strategis SKPD

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global, mengalami perlambatan ekonomi
2. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
3. Kalsel sebagai Gerbang Ibukota Negara
4. Hilirisasi Industri
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Perizinan dan Nonperizinan

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.
2. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
2. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
3. Belum optimalnya promosi investasi;
4. Ketidakmerataan penanaman modal;
5. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
6. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Menuju pelayanan prima;
8. Terbatasnya sumber daya manusia;
9. sarana dan prasarana belum optimal;
10. sistem informasi pelayanan belum optimal;

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Realisasi investasi belum optimal	Realisasi investasi non-ekstraktif belum optimal	Identifikasi dan daya tarik potensi investasi belum memadai	Pemutakhiran peta potensi investasi masih diperlukan
		Promosi investasi belum memadai	Promosi langsung belum memadai
			Promosi tidak langsung menggunakan media teknologi belum memadai
		Kerjasama penanaman modal belum optimal	Inisiasi dan tindak lanjut kerjasama perlu ditingkatkan
		Pelaporan investasi berbasis sistem elektronik belum optimal	Sarana dan prasarana belum memadai
		Penanganan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha perlu ditingkatkan	Ketaatan pelaku usaha belum memadai
		Kemudahan perizinan perlu ditingkatkan	Kapasitas SDM petugas belum memadai
			Sarana dan prasarana belum memadai

Penentuan Isu-isu Strategis

Realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini masih belum mencapai tingkat yang optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyadari bahwa meskipun Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta peluang investasi di berbagai sektor yang menjanjikan, pemanfaatannya belum sepenuhnya maksimal. Capaian realisasi investasi memang telah memenuhi target secara umum, namun kontribusi dari sektor non-ekstraktif masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis ke depan, khususnya untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor non-ekstraktif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut rincian tabel isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan:

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Industri ekstraktif batubara dan mineral yang telah berkembang dan terintegrasi antara aktivitas hulu dan hilir di Kalimantan Selatan	Belum optimalnya realisasi investasi PMA/PMDN industri non-ekstraktif	Ketergantungan Ekonomi pada Sumber Daya Alam	Larangan impor batubara oleh Uni Eropa mulai tahun 2030 berdasarkan UN Paris Climate Agreement	Tekanan ESG (Environmental, Social, Governance) dari investor nasional untuk proyek ramah lingkungan.	Persaingan dengan beberapa provinsi lain di Kalimantan dalam menarik investasi bidang energi terbarukan	Pengembangan investasi non industri ekstraktif
Kawasan Industri ekstraktif batubara dan mineral yang telah berkembang dan terintegrasi antara aktivitas hulu dan hilir di Kalimantan Selatan	Kurangnya pengawasan berkelanjutan kepada PMA dan PMDN					
Potensi Ekonomi Maritim yang didukung oleh jalur laut dan sungai, dan kawasan logistik strategis di wilayah pesisir Kalimantan	Belum optimalnya promosi investasi yang berkelanjutan		Tekanan ESG (Environmental, Social, Governance) dari investor global untuk proyek ramah lingkungan.	Perubahan kebijakan tata kelola pertambangan dan investasi berkelanjutan di level Nasional		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAH AN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Selatan						
Sistem OSS (Online Single Submission) sebagai platform utama percepatan proses perizinan di Kalimantan Selatan	Kualitas pelayanan publik masih belum optimal	Kelemahan Pengawasan dan Penegakan Hukum				Belum optimalnya pelayanan publik yang prima

Salah satu penyebab belum optimalnya investasi di sektor non-ekstraktif adalah adanya kendala dalam proses pelayanan perizinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencermati bahwa prosedur perizinan yang belum sepenuhnya sederhana, terbatasnya akses informasi bagi calon investor, serta belum terjalinnnya koordinasi yang optimal antar perangkat daerah menjadi tantangan utama yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan menjadi prioritas dalam upaya mempercepat dan mempermudah proses investasi.

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penting yang turut memengaruhi minat investor, khususnya di sektor non-ekstraktif. Masih terdapat tantangan terkait konektivitas wilayah, ketersediaan energi dan air bersih, serta kepastian hukum terhadap lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berdaya saing.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan, serta menjalin kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk investor, pelaku usaha, dan instansi pemerintah pusat. Diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat mendorong peningkatan realisasi investasi yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAKIP, dapat disesuaikan sebagaimana contoh berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi urusan yang ditangani.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2025, dan Penetapan Kinerja Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

“KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan)

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 :

1. Pembangunan Manusia yang unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
2. Pembangunan Infrastruktur yang handal
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata dan Syariah
4. Penguatan ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
5. Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat

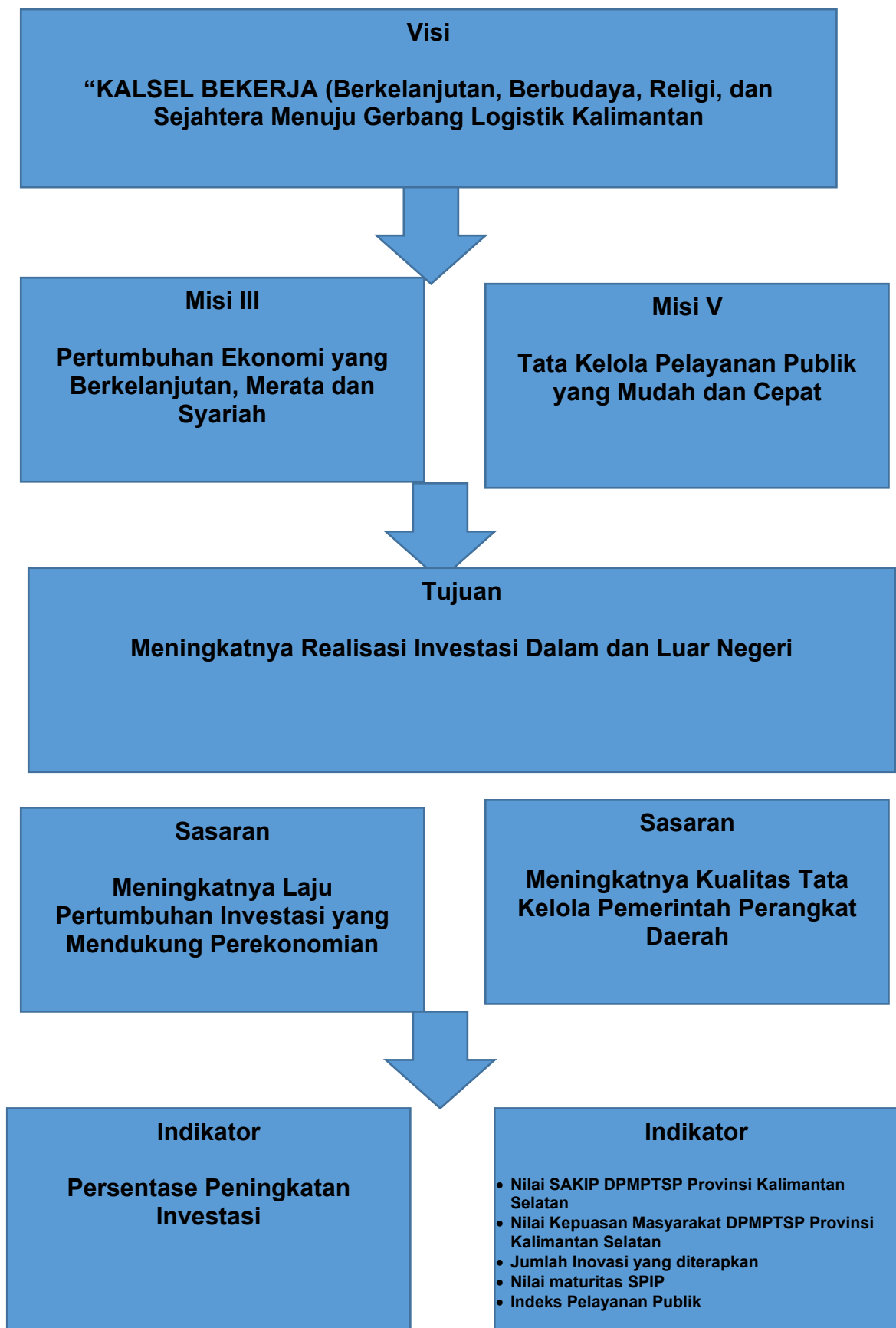
Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 mengacu pada **Misi III dan Misi V**.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
Kondisi 1) Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014), titik terendah pada 3,84% (2015 2.) Investasi di kalsel tahun 2014 mengalami penurunan, terutama di sektor tambang 3) Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan Isu 1) Pengembangan Investasi non Industri Ekstraktif 2) Belum optimalnya pelayanan Publik yang prima	Tujuan - Meningkatnya Realisasi Investasi Dalam dan Luar Negeri Sasaran - Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang mendukung Perekonomian - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Strategi - Peningkatan Identifikasi dan Daya Tarik Potensi Investasi - Peningkatan Promosi Investasi - Pengembangan Kerjasama Penanaman Modal - Peningkatan Kualitas Pelaporan Investasi Berbasis Sistem Elektronik - Peningkatan Penanganan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha - Peningkatan Kemudahan Perizinan	- Pemutakhiran Peta Potensi Investasi - Peningkatan Promosi Langsung - Peningkatan Promosi Tidak Langsung Berbasis Teknologi - Peningkatan Inisiasi dan Tindak Lanjut Kerjasama - Perluasan realisasi Investasi non industry Ekstraktif - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana - Peningkatan indentifikasi dan respon penanganan - Peningkatan kapasitas SDM petugas - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana - Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis sistem elektronik - Penguatan koordinasi untuk meningkatkan stabilitas dan kondusivitas wilayah dan dukungan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :: - Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi - Program Promosi Penanaman Modal - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi - Program Pelayanan Penanaman Modal - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Kinerja Utama	Indikator	Target
Kepala Dinas	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang mendukung Perekonomian	Persentase Peningkatan Investasi	3.47%
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan	AA (90.01)
		Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selata	95 Poin
		Jumlah Inovasi yang diterapkan	1 Inovasi
		Nilai Maturitas SPIP	3
		Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (40.01)
Sekretaris	Meningkatnya kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	100%
		Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%
		Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100%

		Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	100%
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Potensi Investasi yang terpetakan	10%
		Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100
Kepala Bidang Promosi PM	Meningkatnya Investor yang Terdaftar	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	6.61%
Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai ketentuan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	70%
Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai ketentuan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial	70%
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi	Meningkatnya Kualitas penyediaan data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dimanfaatkan	100%
Kepala Bidang Pengendalian PM	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha yang terselesaikan	80%
		Persentase pelaku usaha yang diawasi sesuai dengan kewenangan Provinsi	0.07%
Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100%

	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%
	Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100%
	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100%
	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%
	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100%

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029, telah ditetapkan 5 (lima) program prioritas urusan penanaman modal beserta Indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	
Urusan Penanaman Modal														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	100%	16.04M	100%	16.10M	100%	16.41M	100%	16.58M	100%	16.78M	100%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	%	10%	10%	1.62M	15%	1.63M	20%	1.62M	25%	1.68M	30%	1.70M	30%
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investor yang Terdaftar	%	7.57%	7.57%	2.16M	8.33%	2.17M	9.46%	2.21M	10.27%	2.24M	11.27%	2.27M	11.27%
Program Pelayanan Penanaman	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan	%	72%	72%	1.77M	74%	1.77M	76%	1.81M	78%	1.83M	80%	1.85M	80%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	%	80%	80%	849 Juta	82%	853 Juta	84%	869 Juta	86%	879 Juta	88%	889 Juta	88%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Meningkatnya Kualitas Penyediaa	%	100%	100%	500 Juta	100%	501 Juta	100%	511 Juta	100%	517 Juta	100%	523 Juta	100%

Penanaman Modal	n Data dan Informasi Penanaman Modal													
-----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Peningkatan Investasi	Persen	3.47	3.47	3.50	3.54	3.57	3.61	3.64

A.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- Lebih dari 90% untuk kategori capaian **Sangat Memuaskan**;*
- 80% s/d 90% untuk kategori capaian **Memuaskan**;*
- 70% s/d 80% untuk kategori capaian **Sangat Baik**;*
- 60% s/d 70% untuk kategori capaian **Baik**;*
- Diatas 50% s/d 60% untuk ketegori capaian **Cukup**;*
- Kurang dari 50% untuk kategori capaian **Kurang**;*

1. Sasaran RPJMD/IKU Pemda/Indikator Tujuan SKPD

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target RPJMD	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian	3.47%	3.25% (tw III)	93.66%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	AA (90.01)	A (83.51)	97.28%
		Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan	95	94.25	99.21%
		Jumlah inovasi yang diterapkan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
		Nilai Maturitas SPIP	3	2.45	81.67%
		Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (40.01)	Prima (40.51)	101.25%
		Rata-rata Capaian			94.76%

Rumus Perhitungan :

- Persentase Peningkatan Investasi rumus penghitungan Selisih antara Realisasi Investasi Tahun Berjalan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya dibagi Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya Dikali 100%.
- Nilai SAKIP rumus penghitungan Nilai diperoleh dari evaluasi AKIP yang dilaksanakan evaluator yang merupakan kalkulasi secara terbobot dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Nilai Kepuasan Masyarakat rumus penghitungan Nilai Kepuasan Masyarakat diperoleh dari survei terhadap penerima layanan dengan perhitungan terbobot pada masing-masing komponen layanan
- Jumlah inovasi rumus penghitungan Jumlah inovasi yang diterapkan adalah nilai hitung dari jumlah inovasi yang diterapkan pada Perangkat Daerah
- Nilai Maturitas SPIP rumus penghitungan Kalkulasi terbobot dari komponen efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan
- Indeks pelayanan publik rumus penghitungan Pembobotan dari 6 komponen yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi

Capaian Kinerja terhadap target Tahun Laporan

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2025		
		2022	2023	2024	Target RPJMD	Realisasi	% Capaian
1.	Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	15.29 Trilyun Rupiah	19.76 Trilyun Rupiah	24.85 Trilyun Rupiah	14,55 Trilyun Rupiah	25,65 Trilyun Rupiah	176.35%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A 88.75	A 94.25	A 93.25	A 89	A 94.25	105.90%
3.	Persentase Peningkatan Investasi	-	-	-	3.47%	3.25 %	93.66%
4.	Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	AA (90.01)	A (83.51)	92.78%
5.	Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	95	94.25	99.21%
6.	Jumlah Inovasi yang diterapkan	-	-	-	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
7.	Nilai Maturitas SPIP	-	-	-	3	2.45	81.67%

8.	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	Sangat Baik (40.01)	Prima (40.51)	101.25%
Rata-rata Capaian							94.76%

Sasaran Strategis : • Meningkatkan Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang mendukung Perekonomian dengan indikator : 1. Persentase Peningkatan Investasi
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator : 2. Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan 3. Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan 4. Jumlah Inovasi yang diterapkan 5. Nilai Maturitas SPIP 6. Indeks Pelayanan Publik

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 6 (enam) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *ouput* yang dapat diukur dalam jangka

pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang mendukung Perekonomian dan Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan 6 (enam) indikator yakni: Persentase Peningkatan Investasi capaian (93.66%), Nilai SAKIP DPMPTSP capaian (92.78), Nilai kepuasan masyarakat DPMPTSP capaian (99.21%), Jumlah inovasi yang diterapkan capaian (100%), Nilai maturitas SPIP capaian (81.67%) dan Indeks pelayanan publik capaian (101.25%).

B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan

1. Esselon II (Kepala Dinas)

Terdapat 2 (dua) Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Esselon II) yakni:

- a. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang mendukung Perekonomian dengan indikator : Persentase Peningkatan Investasi (Persen)
- b. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator :
 - Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
 - Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
 - Jumlah Inovasi yang diterapkan
 - Nilai Maturitas SPIP
 - Indeks Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target RPJMD	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian	3.47%	3.25% (tw III)	93.66%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	AA (90.01)	A (83.51)	97.28%
		Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan	95	94.25	99.21%

	Jumlah inovasi yang diterapkan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
	Nilai Maturitas SPIP	3	2.45	81.67%
	Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (40.01)	Prima (40.51)	101.25%
Rata-rata Capaian				94.76%

Rumus Perhitungan :

- Persentase Peningkatan Investasi rumus penghitungan Selisih antara Realisasi Investasi Tahun Berjalan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya dibagi Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya Dikali 100%.
- Nilai SAKIP rumus penghitungan Nilai diperoleh dari evaluasi AKIP yang dilaksanakan evaluator yang merupakan kalkulasi secara terbobot dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Nilai Kepuasan Masyarakat rumus penghitungan Nilai Kepuasan Masyarakat diperoleh dari survei terhadap penerima layanan dengan perhitungan terbobot pada masing-masing komponen layanan
- Jumlah inovasi rumus penghitungan Jumlah inovasi yang diterapkan adalah nilai hitung dari jumlah inovasi yang diterapkan pada Perangkat Daerah
- Nilai Maturitas SPIP rumus penghitungan Kalkulasi terbobot dari komponen efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan
- Indeks pelayanan publik rumus penghitungan Pembobotan dari 6 komponen yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) kinerja utama dan 6 (enam) indikator dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian	Persentase Peningkatan Investasi	3.47%	3.25%	93.66%	Selisih antara Realisasi Investasi Tahun Berjalan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya dibagi Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya Dikali 100%.	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel, BKPM RI
2	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Selatan	AA (90.01)	A (83.51)	92.78%	Nilai diperoleh dari evaluasi AKIP yang dilaksanakan evaluator yang merupakan kalkulasi secara terbobot dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Dinas PM dan PTSP
		Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Selatan	95	94.25	99.21%	Nilai Kepuasan Masyarakat diperoleh dari survei terhadap penerima layanan dengan perhitungan terbobot pada masing-masing komponen layanan	Dinas PM dan PTSP, Survey Masyarakat at
		Jumlah Inovasi yang diterapkan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	Jumlah inovasi yang diterapkan adalah nilai hitung dari jumlah inovasi yang diterapkan pada Perangkat Daerah	Dinas PM dan PTSP
		Nilai Maturitas SPIP	3	2.45	81.67%	Kalkulasi terbobot dari komponen efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan	Dinas PM dan PTSP
		Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (40.01)	Prima (40.51)	101.25	Pembobotan dari 6 komponen yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					94.76%		

Penjelasan :

Penjelasan			
1, Persentase peningkatan investasi yaitu realisasi investasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dibagi realisasi tahun sebelumnya di kali 100% : nilai realisasi investasi triwulan III			
2, Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 83,51			
3, Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 94,25			
4, Jumlah inovasi yang diterapkan 1 inovasi yaitu aplikasi bekantan (Berinvestasi Kalimantan Selatan) untuk promosi dan kemudahan investasi, menampilkan data spasial potensi, peluang, infrastruktur, kawasan industri, serta proyek siap tawar di 13 kabupaten/kota			
5, Nilai Maturitas SPIP 2,45 terdiri dari			
Komponen Penilaian	Skor		
Penetapan Tujuan	1,800		
Struktur dan Proses	0,537		
Pencapaian Tujuan	0,120		
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2,457		
6, Indeks pelayanan publik untuk DPMPTSP mendapatkan indeks 40,51 dengan nilai Prima			

Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2024 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Target 2024 Realisasi 2024 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Target 2025 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Target 2025 Realisasi 2025 (sesuai RPJMD dan Renstra)
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	13.520.000.000.000	24.850.000.000.000 (183.80%)	14.550.000.000.000	25.659.132.816.388 (176.35%)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.75)	A (93.25) 105.07%	A (89)	A (94.25) 105.90%
3.	Persentase Peningkatan Investasi	-	-	3.47%	3.25% 93.66%
4.	Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	95	94.25 99.21%
5.	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	AA (90.01)	A (83.51) 92.78%
6.	Jumlah Inovasi yang diterapkan	-	-	1 Inovasi	1 Inovasi 100%

7.	Nilai Maturitas SPIP	-	-	3	2.45 81.67%
8.	Indeks Pelayanan Publik	-	-	Sangat Baik (40.01)	Prima (40.51) 101.25%

b. Perbandingan kinerja sesuai RPJMD dan Renstra

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
		TARGET	REAL TW III	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
TARGET RPJMD KALSEL (RENSTRA DPMPTSP PROV. KALSEL):																			
- Persentase Peningkatan Investasi	3.47%	3.47%	3.25%	93.66%	3.5%			3.54%			3.57%			3.61%			3.64%		

c. Perbandingan Realisasi kinerja tingkat Regional dan Nasional

Kalimantan Selatan		Kalimantan Barat		Kalimantan Tengah		Kalimantan Timur		Kalimantan Utara	
Target	Realisasi TW III	Target	Realisasi TW III	Target	Realisasi TW III	Target	Realisasi TW III	Target	Realisasi TW III
19.10 Trilyun Rupiah	25.65 Trilyun Rupiah	21.84 Trilyun Rupiah	31.29 Trilyun Rupiah	23.83 Trilyun Rupiah	19.22 Trilyun Rupiah	76.02 Trilyun Rupiah	69.52 Trilyun Rupiah	15 Trilyun Rupiah	19.80 Trilyun Rupiah

d. Target SDGs

Nama Indikator	Program	Satuan	Target Pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persen	20	25	30	35	40
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persen	30	32	36	40	42
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Poin	88,25	88,5	88,75	89	89,25
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persen	35	40	45	50	50
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100

2) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025, target yang telah ditetapkan diperkirakan akan tercapai.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, *one-one meeting*, dan lainnya.
6. *Matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
12. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

13. Luncurkan Aplikasi Bekantan Pemprov Kalsel untuk promosi dan fasilitasi investasi, menyajikan informasi potensi, peluang, infrastruktur, dan data investasi 13 kabupaten/kota

✓ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk melaporkan LKPM
- Adanya perubahan system dari oss 1.1 ke oss RBA, sehingga mengalami kendala untuk menarik data rencana investasi perusahaan
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target investasi masing-masing yang telah diberikan
- Adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPTSP Kab/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi

✓ Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi dengan PIC di masing-masing Kab/Kota terkait pencapaian realisasi investasi untuk TA 2024
- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama satgas percepatan pelaksanaan berusaha Prov Kalsel
- Melaksanakan Bimteks OSS RBA dan Bimtek implementasi pengawasan perizinan berubah
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk pendataan rencana investasi perusahaan penanaman modal.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 pada urusan penanaman modal yakni: Peningkatan Investasi dengan target **3.47%**, sasaran RPJMD sama dengan capaian kinerja eselon II.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga *Front Officer*
7. Tersedianya *Help Desk*
8. Implementasi perizinan secara *online* dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan *Online Single Submission* (OSS)
9. *Digital Signature* untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015

3) Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - v. Pengadaan Barang Milik Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
- vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal
 - b) Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
 - ii. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - a) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 - b) Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

- III. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Pengawasan Penanaman Modal
 - b) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
 - c) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Esselon III (Sekretaris)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET DAN CAPAIAN			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	100%	100%	100.00%	Dinas PM dan PTSP
2		Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%	100%	100.00%	Dinas PM dan PTSP
3		Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100%	100%	100.00%	Dinas PM dan PTSP
4.		Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%	Dinas PM dan PTSP
5.		Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	100%	100%	100.00%	Dinas PM dan PTSP

Cara Menghitung :

- Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%) = $(\text{Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu}) \div (\text{Jumlah total kegiatan yang direncanakan}) \times 100\%$
- Persentase Laporan/Telaah Staf Tepat Waktu (%) = $(\text{Jumlah laporan/telaah yang selesai tepat waktu} \div \text{Total laporan/telaah yang ditugaskan}) \times 100\%$
- Nilai Kepatuhan (%) = $(\text{Jumlah item administrasi yang dipatuhi}) \div (\text{Jumlah total item yang diwajibkan}) \times 100$

- $\{\text{Persentase Aduan yang Ditindaklanjuti}\} = \{\text{Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti}\} / \{\text{Jumlah Aduan yang Masuk}\} \times 100\%$

Penjelasan Komponen Rumus :

Jumlah Aduan yang Masuk: Total aduan yang diterima oleh unit kesekretariatan selama periode waktu tertentu.

Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti: Jumlah dari aduan tersebut yang sudah mendapatkan respon dan/atau penyelesaian.

- Indeks Persepsi Internal (%) = $(\sum \text{Skor aktual} / \sum \text{Skor maksimal}) \times 100$
- Langkah-langkah perhitungan: 1. Tentukan aspek layanan yang dinilai oleh unit kerja penerima layanan (misalnya): Ketepatan waktu dukungan surat-menyurat Responsivitas sekretariat dalam permintaan rapat/fasilitasi Ketersediaan dokumen renja, telaah staf, notulen, dll Koordinasi dan komunikasi sekretariat 2Gunakan skala penilaian 1–4 atau 1–5 (misal: sangat tidak puas = 1 sampai sangat puas = 4) Rumus per indikator (aspek layanan):
- Rata-rata skor aktual = $(\text{Total skor semua responden untuk aspek tsb}) \div (\text{Jumlah responden})$ Total Indeks Akhir (jika multi aspek): $\text{Jumlah rata-rata seluruh aspek} \div \text{jumlah aspek} \times 100$ Profesionalitas staf sekretariat

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR	2024		2025	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (83)	A (84,25)	-	-
2.	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	88,74%	-	-
3.	Persentase Aset yang tercatat	100%	100%	-	-
4.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80%	-	-
5.	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100,00%	-	-
6.	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%	100,00%	-	-
7.	Persentase kegiatan tepat waktu	-	-	100%	100,00%
8	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	-	-	100%	100,00%
9	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	-	-	100%	100,00%
10	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100,00%
11	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	-	-	100%	100,00%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditargetkan A dengan nilai 83 dan terealisasi **A dengan nilai 84.25** untuk tahun 2025 tidak ada indikator karena indikator untuk nilai SAKIP indikatornya eselon II sesuai renstra terbaru

Indikator Kedua Persentase Penyerapan Anggaran SKPD ditargetkan 85% dengan terealisasi , sehingga kinerja mencapai 88.74% untuk tahun 2025 tidak ada indikator karena indikator persentase penyerapan anggaran SKPD tidak tertuang di renstra baru.

Indikator Ketiga Persentase Aset yang tercatat ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100% untuk tahun 2025 tidak ada indikator karena indikator Persentase Aset yang tercatat tidak tertuang di renstra baru.

Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ditargetkan 80% dengan terealisasi 80% sehingga kinerja mencapai 100% untuk tahun 2025 tidak ada indikator karena indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD yang tercatat tidak tertuang di renstra baru.

Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100% untuk tahun 2025 tidak ada indikator karena indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian yang tercatat tidak tertuang di renstra baru.

Indikator Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100% untuk tahun 2025 tidak ada indikator karena Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham tidak tertuang di renstra baru.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian	Target 2025	Realisasi 2025 dan % capaian
1	Nilai SAKIP DPMPTSP	A (83)	A (84,25) 101.51%	-	-
2	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	85%	88,74% (104.40%)	-	-
3	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80% (100%)	-	-
4	Persentase Peserta Pelatihan/ Bimtek yang paham	100%	100% (100%)	-	-
5	Persentase Aset yang tercatat	100%	100% (100%)	-	-
6	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	88.74% 104.40%	-	-
7.	Persentase kegiatan tepat waktu	-	-	100%	100% (100%)
8.	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	-	-	100%	100% (100%)
9.	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	-	-	100%	100% (100%)
10	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100% (100%)
11	Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat	-	-	100%	100% (100%)

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Persentase kegiatan tepat waktu ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketiga yaitu Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Keempat yaitu Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Kelima yaitu Persepsi internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyusunan anggaran

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran.

4) Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

v. Pengadaan Barang Milik Daerah

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1) Esselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	Dinas PM dan PTSP
2.	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	Dinas PM dan PTSP
3.	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100%	100%	100%	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100%	

Cara Menghitung :

- Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian
- Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi
- Jumlah jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%	-	-	-
2.	Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga	100%	-	-	-
3.	Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	100%	-	-	-
4.	Persentase Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	-	-	-
5.	Jumlah Dokumentasi penyediaan	1 Dokumen	-	-	-

	sarana dan prasarana				
6.	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 Dokumen	-	-	-
7.	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	-	100%	100%	100%
8	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	-	100%	100%	100%
9	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketiga yaitu Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Keempat yaitu Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Kelima yaitu Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Keenam yaitu Jumlah dokumen kebutuhan diklat ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian	Target 2025	Realisasi 2025 dan % capaian
1.	Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%	100% 100%	-	-
2.	Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga	100%	100% 100%	-	-
3.	Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	100%	100% 100%	-	-
4.	Persentase Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	100% 100%	-	-
5.	Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	-	-
6.	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	-	-

7.	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	-	-	100%	100% 100%
8.	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	-	-	100%	100% 100%
9.	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	-	-	100%	100% 100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian terealisasi **100% dengan capaian 100%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi terealisasi **100% dengan capaian 100%**

Indikator Ketiga yaitu Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP terealisasi **100% dengan capaian 100%**

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya –upaya yang telah dilakukan

- Melakukan penertiban format perumusan surat keluar/surat masuk ditiap-tiap bidang dan sekretariat kantor
- Melakukan penertiban format perumusan surat izin/kode surat izin dibidang perizinan
- Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana kantor khususnya dibagian pelayanan
- Merekap segala urusan administrasi seluruh pegawai kantor

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Pengarsipan surat menyurat dan dokumen perizinan yang belum terorganisir
- Ruang sarana pengarsipan surat/dokumen yang belum memadai
- Anggaran pelatihan/bimtek yang terbatas sehingga belum bisa mengakomodir kebutuhan pelatihan/bimtek kantor

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengatur dan mengorganisir mulai dari masuk surat sampai kepada pengarsipannya
- Mengajukan anggaran ditahun berikutnya untuk rehab/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dikantor

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Esselon IV (Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100%	100%	100%	Dinas PM dan PTSP
2	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%	100%	100%	Dinas PM dan PTSP
3	Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	100,00%	Dinas PM dan PTSP
4.	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100,00%	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100%	

Cara Menghitung :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP
- Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu
- Jumlah pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang
- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	25.39	-	-	-
2.	Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	12.69	-	-	-
3.	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen	-	-	-
4	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	-	-	-
5	Persentase Aset yang dikelola	100%	-	-	-

6.	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	-	100%	100%	100%
7.	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	-	100%	100%	100%
8.	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	-	100%	100%	100%
9.	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

Indikator nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2024 nilai 28 terealisasi 25.39 sehingga kinerja mencapai 90.68%

Indikator nilai Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2024 nilai 14 terealisasi 12.69 sehingga kinerja mencapai 90.64%

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan ditargetkan tahun 2024 6 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Dokumen LAKIP	Dokumen Renja
Dokumen Laporan Tahunan	Dokumen Renja Perubahan
Dokumen LKPJ/LPPD	Dokumen Bulanan Keuangan dan Fisik

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2024 1 dokumen sehingga kinerja mencapai 100% yaitu tersedianya dokumen laporan keuangan akuntansi

Indikator Persentase aset yang dikelola tahun 2024 ditargetkan 100% sehingga kinerja mencapai 100% yaitu

Kamera Digital 1 unit	Smartphone 2 buah	Lemari kaca 1 unit
Drone 1 unit	Interactive Plat panel display 2 buah	Meja Kerja partisi 12 Unit
Televisi 2 unit	Monitor 2 buah	Kursi Rapat 2 Buah
Belanja Peralatan studio audio (sound system) 1 set	Scanner 2 Buah	Sofa 2 set
Tablet PC 3 unit	Laptop 7 Unit	Kursi Kerja 9 Buah
Notebook 1 Unit	PC unit 3 buah	
Printer 10 Buah	CCTV 1 set	

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian	Target 2025	Realisasi 2025 dan % capaian
1	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	25.39 90.68%	-	-
2	Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	12.69 90.64%	-	-
3.	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen 100.00%	-	-
4.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen 100.00%	-	-
5.	Persentase aset yang dikelola	100%	100% 100.00%	-	-
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			100%	100% 100.00%

	Daerah yang disusun sesuai SOP				
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu			100%	100% 100.00%
	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang			100%	100% 100.00%
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100%	100% 100.00%

Penjelasan :

Indikator nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2024 nilai 28 terealisasi 25.39 sehingga kinerja mencapai 91.07%

Indikator nilai Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2024 nilai 14 terealisasi 12.69 sehingga kinerja mencapai 87.86%

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan ditargetkan tahun 2024 6 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2024 1 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase aset yang dikelola tahun 2024 ditargetkan 100% sehingga kinerja mencapai 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
- Koordinasi intensif dengan Bappeda, Bakeuda, Biro Organisasi, dan Inspektorat

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Pemahaman terkait indikator kinerja oleh stakeholder masih belum maksimal

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran
- Koordinasi terkait indikator kinerja dengan Biro Organisasi

3) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- e) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- (i) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (ii) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(i) Pengadaan Mebel

(ii) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Esselon III (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Potensi Investasi yang terpetakan	10%	10%	100%	Dinas PM dan PTSP
2.		Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	100%	100%	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,00.%	

Cara Menghitung :

- Jumlah kajian (ipro/fs/prafs) yang dikerjakan dalam satu tahun dibagi usulan peta potensi investasi skpd provinsi dan 13 kabupaten kota
- Realisasi terhadap target investasi sama dengan realisasi total dibagi target investasi dikali 100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	-	-	-
2.	Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	-	-	-
3.	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	-	-	-
4.	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	-	-	-
5.	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100% (8 Sektor)	-	-	-
6.	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	-	-	-
7.	Persentase Potensi Investasi yang terpetakan	-	10%	10%	100%
8.	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

- a. Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan yaitu 8/8 kemitraan (100%) sehingga capaian nya 100%

Perusahaan Besar	UMKM
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Hj Najmi Atus Saadah, S.Pd UKM
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, Dr Hj Rosally Gunawan	Sukma HSI Sasirangan
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Jamilah Fanesya Sasirangan
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Jamilah Fanesya Sasirangan
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel Dr Hj	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan

Rosally Gunawan	Pipih
Vendor Bagus Mualang, Lantan wasnawati	Fuad Hasan Sasirangan
Vendor Bagus Mualang, Lantan wasnawati	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan Pipih
Vendor Bagus Mualang, Lantan wasnawati	Rusimah Dodol Madu Kasiran Raisa
Vendor Bagus Mualang, Lantan wasnawati	Ridhawaty Hilma Sasirangan

b. Persentase Potensi Investasi Dipromosikan dengan capaian 100%

• PLTA Kusan Tanah Bumbu • Pemotongan Hewan Modern • Geopark Gunung Meratus • KEK Pariwisata Loksado • Pembangunan Sport City

c. Persentase Potensi investasi yang berbasis lingkungan yaitu 100% sehingga capaian nya 100%

• Kawasan Ekowisata Suaka Margasatwa Kuala Lupak
• Pengembangan Peternakan Sapi

d. Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan yaitu 1 dokumen sehingga capaiannya 100% yaitu tersedianya 1 dokumen potensi investasi berbasis lingkungan

e. Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi yaitu target 100% sehingga capaiannya 100% yaitu

• Sektor Pariwisata • Sektor Pangan • Sektor Infrastruktur dan Sosial • Sektor Energi	• Sektor Industri • Sektor Perdagangan • Sektor UMKM • Sektor Jasa
--	---

f. Jumlah Kemitraan Dunia Usaha yaitu target 4 Kemitraan sehingga capaiannya 100% yaitu :

- Widia Safitri Sasirangan Pewarna Alam
- Siti Jaleha Kue kering Abon Ikan Tenggiri
- Nur Ulfah Sasirangan Kotabaru

Tahun 2025

- Indikator Persentase potensi investasi yang terpetakan dengan target 10% terealisasi 10% capaian 100% yaitu potensi investasi yang terpetakan ada 4 kajian IPRO pra fs dibagi ada 40 peta potensi investasi

4 Kajian IPRO
IPRO Industri Pengolahan sarang wallet di Provinsi Kalimantan Selatan
Kajian Pra fs Pengembangan Ekowisata Pulau curiak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025
Kajian Pra fs Pengembangan Industri Kaolin Kabupaten Tapin Tahun 2025
Kajian Pra fs Studi Kelayakan (Feasibility Study/Pra FS) Pengembangan Hotel Batung Batulis Tahun 2025

- Indikator Realisasi Total terhadap target Investasi yaitu realisasi total sampai triwulan III 24.850.000.000 dibagi target investasi 13.520.000.000 di kali 100% hasilnya 183.80%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian	Target 2025	Realisasi 2025 dan % capaian
1.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100% 100%	100%	100% 100%
2.	Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100% 100%	100%	100% 100%
3.	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20% 100%	20%	20% 100%
4.	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	1 Dokumen	1 Dokumen 100%
5.	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100%	100% 100%	100%	100% 100%
6.	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan 100%	4 Kemitraan	4 Kemitraan 100%
7.	Persentase Potensi Investasi yang terpetakan			10%	10% 100%

8.	Realisasi Total terhadap Target Investasi			100%	100% 100%
----	---	--	--	------	--------------

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Terlaksananya Kemitraan dunia usaha antara pengusaha besar dengan UMKM se Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
- Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan dengan Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota se Kalsel mengenai potensi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Minimnya data potensi investasi di Kabupaten/Kota yang ada di Kalsel
- Kurangnya keterlibatan dan pemahaman dari DPMPTSP Kabupaten/Kota terkait fasilitasi kemitraan UMKM dengan pengusaha besar
- Terbatasnya dana yang tersedia sehingga membuat terbatasnya kegiatan dan koordinasi dengan pusat maupun daerah

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan supervisi dan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota tentang fasilitasi kemitraan dunia usaha
- Menambahkan anggaran untuk kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim PM
- Melakukan monitoring/evaluasi baik tentang pelaksanaan kemitraan maupun pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi investasi di Kalimantan Selatan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

4. Esselon III (Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkanya Investor	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	6.61%	6.61%	100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-Rata Pencapaian					100%	

Cara Menghitung :

- Jumlah investor baru dikurang jumlah investor lama dibagi jumlah investor di kali 100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	-	-	-
2.	Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	-	-	-
3	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	-	-	-
4	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	-	-	-
5	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	-	-	-
6	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	-	-	-
7.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi		6.61%	6.61%	100%

Penjelasan :

Indikator Persentase peningkatan calon investor Tahun 2024 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100%.

2024
✓ PT Guang Yin New

Indikator Persentase Promosi yang ditindaklanjuti Tahun 2024 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100%.

2024
✓ PLTA Kusan Tanah Bumbu
✓ Pemotongan Hewan Modern
✓ KEK Pariwisata Loksado
✓ Pembangunan Sport City
✓ Geopark Gunung Meratus

Indikator Jumlah item Media promosi investasi Tahun 2024 di targetkan 6 item terealisasi 6 item sehingga capaian 100%.

2024
✓ Buku
✓ Rakor
✓ Brosur
✓ Booklet
✓ Roll Banner
✓ Kalender

Indikator Jumlah pelaksanaan kegiatan seminar bisnis, forum, one on meeting Tahun 2024 di targetkan 3 kali terealisasi sehingga capaian 100%.

2024
✓ Door to Door ke KADIN Jakarta
✓ Door to Door ke HIPMI Jakarta
✓ High Level Meeting di Banjarmasin

Indikator Persentase potensi investasi daerah yang diminati Tahun 2024 di targetkan 50% terealisasi 50% sehingga capaian 100%.

2024
✓ PLTA Kusan Tanah Bumbu ✓ Pemotongan Hewan Modern ✓ KEK Pariwisata Loksado ✓ Pembangunan Sport City ✓ Geopark Gunung Meratus

Indikator Jumlah pelaksanaan promosi investasi Tahun 2024 di targetkan 3 kali terealisasi 3 kali sehingga capaian 100%.

2024
✓ Pameran Promosi Investasi Indonesia Tourism Trade Investment Expo 2024 di DIY Yogyakarta ✓ Pameran Promosi Investasi Indonesia Toursim Trade Investment Expo 2024 di Jawa Tengah ✓ Kalsel Expo 2024 di Banjarbaru

Tahun 2025

Indikator Persentase Peningkatan investor yang berinvestasi ditargetkan 6.61% terealisasi 6.61% sehingga capaian 100% yaitu 6.61% kenaikan 9 investor

Nama Perusahaan	Uraian Skala Usaha	Uraian Jenis Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kab/Kota
Jiangsu Jiangue Deli Indonesia	Usaha Besar	Perseroan Terbatas (PT)	Jl Sutoyo S	Kota Banjarmasin
Guang Yin PLTA Kusan	Usaha Besar	Perseroan Terbatas (PT)	Jl Petiti No 93	Kab Tanah Bumbu
Han Ice Cream	Usaha	Perseroan	Jl Banjar Gawi	Kota

Beverages	Besar	Terbatas (PT)	Barat No 1	Banjarbaru
Green Diamond Energy	Usaha Besar	Perseroan Terbatas (PT)	Jl Gubernur Subarjo No 8 Basirih	Kota Banjarmasin'
Karisma Mandiri Mining	Usaha Besar	Perseroan Terbatas (PT)	Jl Pahlawan 104	Kab Tabalong
Bharat Indo Trading	Usaha Besar	Perseroan Terbatas (PT)	Komp Green Yakin Cluster Amanda	Kab Banjar
Wanda Renewable Energy	Usaha Besar	Perseroan Terbatas (PT)	Jl Lingkar Selatan HM 2645	Kab Banjar
Diam Technology Hub	Usaha Besar	Perseroan Terbatas (PT)	Komp Perumahan 10 Station No 8A	Kab Tabalong
Yutong Jian Zhu Cheng	Usaha Besar	Perseroan Terbatas (PT)	Jl Trans Kalimantan	Kab Tanah Bumbu

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian	Target 2025	Realisasi 2025 dan % capaian
1.	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	30% 100%	30%	30% 100%
2	Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	25% 100%	25%	25% 100%
3	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item 100%	6 Item	6 Item 100%
4	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali 100%	3 Kali	3 Kali 100%
5	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	50% 100%	50%	50% 100%
6	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali 100%	3 Kali	3 Kali 100%

7.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	-	-	6.61%	6.61% 100%
----	---	---	---	-------	---------------

Penjelasan :

Persentase Peningkatan Calon Investor ditargetkan **30%** terealisasi **30%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Persentase Promosi yang ditindaklanjuti ditargetkan **25%** terealisasi **25%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Jumlah Item Media Promosi Investasi ditargetkan **6 item** terealisasi **6 item** sehingga kinerja mencapai **100%**

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting ditargetkan **3 Kali** terealisasi 3 Kali sehingga kinerja mencapai **100%**.

Persentase Potensi investasi daerah yang diminati ditargetkan **50%** terealisasi 50% sehingga kinerja mencapai **100%**.

Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi ditargetkan **3 Kali** terealisasi 3 Kali sehingga kinerja mencapai **100%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pameran, media promosi investasi dan melaksanakan seminar bisnis, forum, one on one meeting
- Meningkatkan kapasitas potensi menjadi ready to offer
- Menyamakan persepsi Kab/Kota terhadap potensi yang potensial untuk dipromosikan dan juga menyamakan persepsi indikator potensi yang ready to offer

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- SDM yang memiliki kapabilitas memadai
- Pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM masih terbatas
- Alokasi anggaran yang masih terbatas

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan
- Peningkatan urusan alokasi anggaran
- Pelaksanaan promosi investasi agar ditambah kegiatannya agar bias menarik calon investor baik dari penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

5. Esselon III (Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha yang terselesaikan	80%	65.91%	82.39%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase pelaku usaha yang diawasi sesuai dengan kewenangan Provinsi	0.07%	0.01%	14.29%	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					48.34%	

Cara Menghitung :

- Jumlah Permasalahan Pelaku Usaha yang diselesaikan dibagi total jumlah permasalahan, permasalahan Laporan Pelaku Usaha, Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pengawasan
- Jumlah pelaku usaha yang diawasi dibagi total pelaku usaha kewenangan provinsi

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100.00%	100%	100.00%	100.00%
2.	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	41.00%	35%	41.00%	117.14%
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	76.92%	55%	76.92%	139.85%
4	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	310 Perusahaan	300 Perusahaan	310 Perusahaan	103.33%
5	Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
6	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	405 Perusahaan	400 Perusahaan	405 Perusahaan	101.25%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha yang terselesaikan	-	80%	65.91%	82.39%
9.	Persentase pelaku usaha yang diawasi sesuai dengan kewenangan Provinsi	-	0.07%	0.01%	14.29%

2) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Membagi PIC untuk Kab/Kota dalam mengkoordinasi target investasi , perusahaan-perusahaan dan pelatihan LKPM
- Mengirimkan email sebagai pengingat/reminder penyampaian LKPM per triwulan
- Melakukan pembinaan/pelatihan LKPM kepada perusahaan melalui telepon/WA
- Melakukan fasilitasi permasalahan perusahaan melalui zoom meeting

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM
- Adanya perubahan system dari oss 1.1 ke oss RBA, sehingga mengalami kendala untuk menarik data rencana investasi perusahaan
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target investasi masing-masing yang telah diberikan
- Adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPTSP Kab/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi dengan PIC di masing-masing Kab/Kota terkait pencapaian realisasi investasi untuk TA 2022
- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama satgas percepatan pelaksanaan berusaha Prov Kalsel
- Melaksanakan Bimteks OSS RBA dan Bimtek implementasi pengawasan perizinan berubah
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk pendataan rencana investasi perusahaan penanaman modal.

3) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025:

- 1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

6. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan infrastruktur dan Sosial)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai ketentuan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial	70%	95.09	134.84%	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Rata-rata Capaian					134.84%	

Cara Menghitung :

Perizinan yang terbit sesuai dengan ketentuan melalui OSS dan SIMAPAN dibagi dengan Perizinan yang Masuk melalui OSS dan SIMAPAN

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (93.75)	-	-	-
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	-	-	-
3.	Persentase Permohonan yang dilayani Bidang Infrastruktur dan sosial	100%	-	-	-
4.	Persentase Usaha Berizin Bidang Infrastruktur dan sosial	90.00%	-	-	-

5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani	55 Jenis Izin	-	-	-
6.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai ketentuan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial	-	70%	95.09%	135.84%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian	Target 2025	Realisasi 2025 dan % capaian
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (88.50)	A (93.75)	A (88.50)	A (90.25) 101.98%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	100%	100%	100% 100%
3.	Persentase Permohonan yang dilayani Bidang Infrastruktur dan sosial	100%	100%	100%	100% 100%
4.	Persentase Usaha Berizin Bidang Infrastruktur dan sosial	90%	90.00%	90%	99.19 110.72%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang perizinan infrastruktur dan social sesuai ketentuan
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi
- Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Instansi teknis terkait

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Perizinan yang melalui OSS masih proses penyempurnaan
- SDM OPD teknis/mitra kerja kurang memahami OSS RBA

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengikuti TOT dan Sosialisasi untuk penyempurnaan OSS RBA menunggu pusat sambil berjalan.

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yakni: Program Pelayanan penanaman Modal kegiatan .

- a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

7. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai ketentuan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	70%	83.42%	119.17%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Rata-rata Capaian					119.17%	

Cara Menghitung :

- Perizinan yang terbit sesuai dengan ketentuan melalui OSS dan SIMAPAN dibagi dengan Perizinan yang Masuk melalui OSS dan SIMAPAN

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (94)	-	-	-
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP	100%	-	-	-
3.	Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	100%	-	-	-
4.	Persentase Usaha Berizin	99.88%	-	-	-
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani	90 Jenis Izin	-	-	-
6.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai	-	70%	83.42%	119.17%

	ketentuan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam				
--	---	--	--	--	--

2) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Pelaksanaan gerai perizinan
- Peninjauan Lapangan
- Koordinasi yang intens dengan Tim teknis
- Konsultasi dan konsolidasi ke Kemnterian Pusat di Jakarta

3.2 Hambatan dan Pencapaian Kinerja

- Banyak pelaku usaha / pemohon ijin yang belum paham tentang OSS RBA
- Kurangnya sosialisasi tentang OSS RBA
- OSS RBA terus berkembang baik itu fitur maupun menu-menunya
- Jaringan yang tidak mendukung
- SDM yang belum ada bekal ilmu yang cukup tentang OSS RBA
- DPMPTSP, Tim Teknis juga masih tahap belajar / mempelajari system OSS RBA
- Masih banyak aplikasi diluar OSS yang dipakai contoh : Dinas perindustrian Aplikasi SINAS, Dinas Kelautan dan Perikanan Aplikasi SIMKADA, BPN Prov Kalsel aplikasi GISTARU
- Adanya dinas teknis tidak tahu adanya kewenangan Provinsi
- Ada beberapa Dinas teknis yang belum mempunyai SOP

3.3 Rencana Tindak lanjut

- Adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke daerah tentang OSS RBA
- SDM yang tersedia sudah paham tentang OSS RBA
- Adanya sosialisasi tentang OSS RBA ke pelaku usaha /pemohon lain

3) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2025, yakni: Program Pelayanan Penanaman Modal dan kegiatan :

a) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

8. Esselon III (Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas penyediaan data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Rata-rata Capaian					100%	

Cara Menghitung :

Data Perizinan dan Penanaman Modal Jumlah data statistik terkait perizinan dan penanaman modal yang dimanfaatkan (diakses, diolah, dan dipublikasikan) dibagi jumlah data yang tersedia

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (94.70)	-	-	-
2.	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	3 Sistem	-	-	-
3.	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-
4.	Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	-	-	-
5.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	-	-	-
6	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dimanfaatkan	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

- Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPSTSP Prov Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Tahun 2024 dengan nilai IKM 94.70 kategori (sangat baik).

- Jumlah sistem informasi yang berjalan dengan lancar dan data informasi yang update yaitu

2024
✓ WEB ✓ SIMAPAN ✓ Social Media

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu tahun 2024 17 pengaduan

2024
✓ Kontak (17)
Total 17 Pengaduan

- Persentase Pemenuhan Pelayanan Investor Tahun 2024 100% yaitu

2024
✓ Berkah Bumi Bersholawat Kabupaten Hulu Sungai Tengah ✓ CV Hasanah Borneo Kabupaten Banjar ✓ CV Alamansyur Mutiara Wisata Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Persentase pemenuhan Konsultasi yaitu 100%

2024
✓ Tatap Muka (302)
Total Pelayanan Konsultasi 302

Indikator Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dimanfaatkan tahun 2025 Dari surat permintaan data, website, satu data, dan e walidata data dan informasi yang dimanfaatkan

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 dan % capaian	Target 2025	Realisasi 2025 dan % capaian
1	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.75)	A (94.70) 107.01%	-	-
2	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	3 Sistem	3 Sistem 100%	-	-
3	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100% 100%	-	-
4	Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100% 100%	-	-
5	Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100% 100%	-	-
6.	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dimanfaatkan	-	-	100%	100% 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang transparan, professional, terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Sarana dan prasarana dan SDM

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengadakan forum fasilitasi perusahaan
- Mengadakan forum konsultasi publik
- Melakukan pendampingan terhadap masyarakat/pihak terkait dalam penyelenggaraan pemohon terpadu perizinan dan non perizinan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu:

- a) Penanaman modal yang menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan Menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- b) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS		Pagu SIPD 2025	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase
UNSUR WAJIB PENANAMAN MODAL					
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.319.725.900	21.559.970.371	2.593.031.821,00	88,65%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.743.093.087	12.999.286.080	1.743.807.007,00	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	946.252.200	776.320.115	169.932.085,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	645.570.700	585.044.455	60.526.245,00	90,62%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.681.500	191.275.660	109.405.840,00	63,61%
	Administrasi Keuangan	7.533.905.100	7.126.809.009	407.096.091,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.231.086.700	6.930.465.060	300.621.640,00	95,84%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.008.100	134.061.200	13.946.900,00	90,58%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	154.810.300	62.282.749	92.527.551,00	40,23%
	Administrasi Kepegawaian	898.614.000	783.880.232	114.733.768,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	761.622.000	671.109.232	90.512.768,00	88,12%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.401.000	6.815.000	14.586.000,00	31,84%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.591.000	23.666.000	7.925.000,00	74,91%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.000.000	82.290.000	1.710.000,00	97,96%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.121.871.100	901.341.684	220.529.416,00	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.768.500	55.947.500	7.821.000,00	87,74%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.698.700	153.555.300	10.143.400,00	93,80%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.654.900	15.500.000	5.154.900,00	75,04%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.614.000	46.474.000	9.140.000,00	83,57%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	139.512.000	137.005.800	2.506.200,00	98,20%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.623.000	492.859.084	185.763.916,00	72,63%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.608.450.000	997.400.000	611.050.000,00	
Pengadaan Mebel	156.300.000	152.100.000	4.200.000,00	97,31%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.452.150.000	845.300.000	606.850.000,00	58,21%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.512.272	948.133.023	161.379.249,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.935.000	13.500.000	2.435.000,00	84,72%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	497.500.000	360.652.223	136.847.777,00	72,49%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.077.272	573.980.800	22.096.472,00	96,29%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.524.488.415	1.465.402.017	59.086.398,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	638.652.000	637.735.345	916.655,00	99,86%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	669.506.415	648.836.672	20.669.743,00	96,91%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.330.000	178.830.000	37.500.000,00	82,67%

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah	-	-	0,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	-	-	0,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (Bidang Renbang)		1.525.924.600	1.345.565.580	180.359.020,00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	426.829.100	309.624.680	117.204.420,00	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	304.944.800	249.349.680	55.595.120,00	81,77%
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	121.884.300	60.275.000	61.609.300,00	49,45%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.099.095.500	1.035.940.900	63.154.600,00	
	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	127.923.300	66.535.000	61.388.300,00	52,01%
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	971.172.200	969.405.900	1.766.300,00	99,82%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Bidang Promosi)		2.263.166.400	2.183.260.600	79.905.800,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.263.166.400	2.183.260.600	79.905.800,00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	266.857.000	220.580.600	46.276.400,00	82,66%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.996.309.400	1.962.680.000	33.629.400,00	98,32%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		2.248.573.200	1.952.152.749	296.420.451,00	
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.248.573.200	1.952.152.749	296.420.451,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.108.456.800	865.099.709	243.357.091,00	78,05%
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	941.733.400	912.233.740	29.499.660,00	96,87%

Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	198.383.000	174.819.300	23.563.700,00	88,12%
PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL (Bidang Dalak)	1.169.494.700	979.978.350	189.516.350,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.169.494.700	979.978.350	189.516.350,00	
Pengawasan Penanaman Modal	641.977.100	592.463.050	49.514.050,00	92,29%
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	110.127.600	49.598.050	60.529.550,00	45,04%
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	417.390.000	337.917.250	79.472.750,00	80,96%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (Bidang Pekdi)	1.073.868.000	970.844.607	103.023.393,00	
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1.073.868.000	970.844.607	103.023.393,00	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.073.868.000	970.844.607	103.023.393,00	90,41%
TOTAL	23.024.119.987	20.431.088.166	2.593.031.821,00	

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

NO	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi	Persentas e
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian	Program Pengembangan iklim penanaman Modal Program promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal Program pelayanan penanaman modal	Rp6.220.364.600,00	Rp5.638.454.231,00	90.65%
2.	Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Rp18.099.361.300,00	Rp15.921.516.140,00.	87.97%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

2024

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS		Pagu SIPD 2024
UNSUR WAJIB PENANAMAN MODAL		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.024.119.987
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.743.093.087
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	946.252.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	645.570.700
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.681.500
	Administrasi Keuangan	7.533.905.100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.231.086.700
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.008.100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	154.810.300
	Administrasi Kepegawaian	898.614.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	761.622.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.401.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.591.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.121.871.100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.768.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.698.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.654.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.614.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	139.512.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.623.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.608.450.000
Pengadaan Mebel	156.300.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.452.150.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.512.272
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.935.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	497.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.077.272
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.524.488.415
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	638.652.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	669.506.415
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.330.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah	-
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	-
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (Bidang Renbang)	1.525.924.600
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	426.829.100
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	304.944.800
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	121.884.300
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.099.095.500
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	127.923.300
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	971.172.200
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Bidang Promosi)	2.263.166.400
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.263.166.400
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	266.857.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.996.309.400
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.248.573.200

	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.248.573.200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.108.456.800
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	941.733.400
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	198.383.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL (Bidang Dalak)	1.169.494.700
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.169.494.700
	Pengawasan Penanaman Modal	641.977.100
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	110.127.600
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	417.390.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (Bidang Pekdi)	1.073.868.000
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1.073.868.000
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.073.868.000
	TOTAL	23.024.119.987

2025

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS		Pagu SIPD 2025
UNSUR WAJIB PENANAMAN MODAL		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.319.725.900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.400.581.500
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	846.826.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	544.883.300
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.015.900
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	47.606.700
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	48.320.100
	Administrasi Keuangan	9.048.853.400
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.726.410.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.240.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	150.203.400
	Administrasi Kepegawaian	830.600.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	711.032.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.830.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.988.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.750.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.227.683.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.162.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.378.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.207.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.800.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	243.289.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	749.846.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.552.475.700
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.921.110.000
	Pengadaan Mebel	250.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	381.365.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.265.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.265.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.882.877.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	873.628.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	819.799.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	189.450.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (Bidang Renbang)	2.243.674.800
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	211.636.000

	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	90.761.000
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	120.875.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.032.038.800
	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	260.798.000
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.471.523.800
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	299.717.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Bidang Promosi)	1.650.329.900
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.650.329.900
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	184.662.600
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.465.667.300
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.421.475.800
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.421.475.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	971.433.400
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	268.840.600
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80.185.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	101.016.800
	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL (Bidang Dalak)	904.884.100
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	904.884.100
	Pengawasan Penanaman Modal	429.706.700
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	166.157.400
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	309.020.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (Bidang Pekdi)	698.779.800
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	698.779.800
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	698.779.800
	TOTAL	24.319.725.900

No	2024		2024	
1.	Belanja Operasi	Belanja Operasi	Belanja Operasi	Rp.21.767.250.200
2.	Belanja Modal	Belanja Modal	Belanja Modal	Rp.25.52.475.700
	Total	Total	Total	Rp.23.319.725.900

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2025 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian di dalam LAKIP Tahun 2025 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yaitu Persentase peningkatan investasi capaian realisasi 93.66%, Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan capaian 92.78%, Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan capaian realisasi 99.21%, Jumlah inovasi yang diterapkan capaian realisasi 100%, Nilai maturitas SPIP capaian realisasi 81.67%, Indeks pelayanan Publik capaian realisasi 101.25% Dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi 94.76% **sangat memuaskan**.

B. Solusi Mengatasi Kendala untuk Peningkatan Kinerja Mendatang

Disamping itu, dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut::

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.
5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
8. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2025-2029 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.